

MEREVITALISASI MODAL SOSIAL, MEMBERDAYAKAN POTENSI LOKAL: MENGURANGI KEMISKINAN PADA WILAYAH HUTAN DI PROVINSI BALI

Nyoman Utari Vipriyanti¹

Ernan Rustiadi²

Krisis ekonomi di Indonesia sejak 1997 telah meningkatkan jumlah orang miskin dari sekitar 27 juta sebelum krisis menjadi 40 juta orang baru-baru ini. Kebanyakan dari penduduk miskin ini tinggal di desa. Indonesia telah mengalami perubahan mendasar dalam bidang politik dan ekonomi maupun sosial. Namun, karena keterbatasan sumberdaya, perubahan terkadang menyakitkan, sehingga ketegangan meningkat dan modal sosial merenggang. Ketika modal ini berkurang, sulit bagi penduduk desa untuk mengembangkan sumberdaya mereka dan mentas dari kemiskinan.

Variabel kesatuan sosial seperti trust, jaringan (network) dan norma sosial berperan penting menurunkan kemiskinan karena di wilayah miskin, modal sosial seringkali menjadi satu-satunya asset yang dimiliki oleh rumah tangga dan masyarakat. Sampai sejauh ini, hanya sedikit perhatian yang diberikan terhadap makna sesungguhnya dari modal sosial karena keterbatasan data, dan persoalan yang terkait dengan pengukuran. Penelitian ini mencoba untuk menjembatani kesenjangan tersebut melalui pemberdayaan masyarakat dari rumah tangga melalui penguatan kembali modal sosial bagi masyarakat miskin yang tertinggal.

Penting untuk memahami hubungan antara modal sosial dan tipe lainnya untuk mengentaskan kemiskinan di pedesaan Bali, khususnya penduduk pedalaman. Studi ini mencoba membuat model hubungan tersebut melalui analisis kuantitatif dan kualitatif.

Hasil studi menunjukkan modal sosial dapat meningkatkan pendapatan rumah tangga melalui tiga cara: (1) peningkatan partisipasi individu dalam jaringan sosial sehingga mengurangi biaya transaksi, dalam rangka peningkatan penerimaan, (2) peningkatan partisipasi dalam

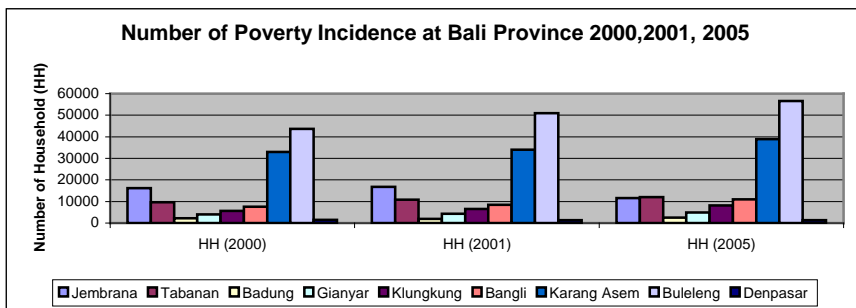
¹ Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian, Universitas Mahasaraswati Denpasar, Bali, Indonesia.

² Jurusan Ilmu Tanah, Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor, Bogor, Indonesia.

jaringan lokal dan menurunkan perilaku mencari untung sendiri (rent seeking) untuk memfasilitasi tindakan bersama, dan (3) perluasan jaringan dan penguatan tingkat kepercayaan sosial sehingga orang desa mempunyai akses terhadap pendidikan, modal, dan layanan kesehatan.

Pendahuluan

Selama lima tahun (2000–2005), produktivitas sektor-sektor dominan di Bali (pertanian; perdagangan, hotel dan restoran; industri dan jasa) telah menurun disebabkan oleh ketidakstabilan keamanan (peledakan bom dan konflik). Hal ini tidak saja berdampak bagi sektor pariwisata, tetapi juga pada sektor lainnya. Penurunan jumlah wisatawan telah melemahkan produktivitas sektor pariwisata, dan meningkatkan pengangguran dan jumlah rumah tangga miskin. Hingga 2005, terjadi peningkatan jumlah rumah tangga miskin (digambarkan pada Bagan 1). Kebanyakan dari rumah tangga miskin di Bali terkonsentrasi di wilayah dominan sektor pertanian, seperti Kabupaten Karangasem, Buleleng, Jembrana, Tabanan, dan Bangli.



Bagan 1
Pertumbuhan Jumlah Rumah-tangga miskin di Bali
antara tahun 2000, 2001 dan 2005

Sejauh ini penelitian kemiskinan di Bali hanya berfokus pada tidak tersedianya modal tradisional seperti mutu dan jumlah sumberdaya alam, manusia, modal, atau fisik (sumberdaya yang kelihatan). Namun, beberapa peneliti telah menyarankan bahwa kemiskinan juga disebabkan oleh kurangnya sumberdaya yang tidak kelihatan seperti modal sosial, termasuk *trust*, norma dan jaringan. Modal sosial akan mempunyai pengaruh positif

terhadap pembangunan ekonomi lewat fasilitasi transaksi antara para individu, rumah tangga dan kelompok di dalam suatu wilayah. Modal sosial juga memfasilitasi peningkatan akses masyarakat miskin kepada fasilitas pendidikan dan kesehatan, dan juga pasokan modal.

Pembangunan berbeda dari pertumbuhan (*growth*), karena pembangunan terfokus pada proses, pertumbuhan jumlah dan juga aspek kualitatif seperti kelembagaan, organisasi, dan kebudayaan di mana ekonomi berlangsung. Oleh karena itu, pembangunan wilayah harus menyertakan perencanaan integral antara aspek-aspek fisik, ekonomi, dan sosial. Sejauh ini, aspek sosial seringkali diabaikan, berbeda dengan pembangunan fisik seperti jalan raya, fasilitas telekomunikasi, dll. Pengabaian ini akan menghasilkan dampak negatif terhadap kehidupan sosial ekonomi publik dan meningkatkan jumlah kemiskinan struktural dan relatif.

Terbatasnya kesempatan kerja sektor pariwisata di Bali telah menurunkan jumlah lapangan kerja bagi penduduk usia kerja, khususnya pasca peledakan bom tahun 2002. Dalam kenyataannya, penurunan lapangan kerja di Bali telah diikuti oleh peningkatan jumlah rumah tangga miskin. Konflik sosial sering terjadi di Bali, khususnya terkait dengan ketidakpercayaan publik terhadap kinerja dan niat baik pemerintah.

Konflik yang terjadi tidak hanya bersifat vertikal tetapi juga horisontal, di antara para anggota desa adat (*desa pakraman*)¹ atau antara kelompok etnis tertentu. Konflik-konflik itu merugikan citra Bali di pasar internasional. Citra yang buruk akan mengurangi kunjungan wisatawan dan mengurangi lama tinggal di Bali. Padahal masyarakat Bali dikenal dengan toleransi yang tinggi menurut norma universal seperti *Tri Hita Karana*², tetapi berubah. Setia (2002) mengemukakan bahwa tren perubahan ini mengarah pada kondisi yang lebih buruk. Dwiyanto (2002), menyatakan bahwa konflik sosial, ekonomi, dan politik seharusnya dapat diselesaikan oleh lembaga tradisional yang ada. Namun dalam kasus Bali, *desa pakraman*, lembaga tradisional yang sejak lama telah mengikat masyarakat Bali secara kuat, tidak mampu untuk mengelola perbedaan di antara para anggotanya, sehingga sering terjadi konflik internal dan eksternal.

¹ Desa adat (desa pakraman) adalah organisasi tradisional dalam masyarakat Hindu.

² Tri Hita Karana adalah nilai universal yang memelihara hubungan antara manusia dengan penciptanya, Tuhan, dan antara manusia dengan manusia dan lingkungannya.

Kemiskinan yang disebabkan oleh kesenjangan pembangunan antara sektor dan wilayah adalah lebih berbahaya karena dapat memicu kecemburuan sosial yang kemudian melemahkan modal sosial. Grootaert (2001) meyakini bahwa kemiskinan memiliki kaitan erat dengan modal; artinya bahwa usaha pemberantasan kemiskinan dapat dilakukan melalui revitalisasi modal sosial. Oleh karena itu, usaha-usaha untuk merevitalisasi modal sosial masyarakat, khususnya di wilayah miskin di Bali adalah satu pilihan yang harus diberi perhatian dan pertimbangan sebagai modal dasar dalam mencapai kehidupan yang lebih baik sebagaimana dinyatakan dalam strategi pengentasan kemiskinan oleh komisi pengentasan kemiskinan. Ciri-ciri sosial untuk mengentaskan kemiskinan diharapkan dapat merevitalisasi budaya bersama melalui penguatan kelembagaan, kepercayaan yang saling menguntungkan, perluasan jaringan, dan penguatan norma-norma yang mengandung kearifan lokal.

Metode dan Hasil

Paper ini menyajikan satu analisis modal sosial untuk menyelesaikan masalah kemiskinan, khususnya hubungan antara determinan-determinan modal sosial dan pendapatan rumah tangga. Data primer dikumpulkan dari 50 petani di sekitar wilayah hutan dan terdiri dari data kualitatif dan kuantitatif yang dianalisis secara statistik. Pengujian terhadap signifikansi hubungan antara determinan-determinan modal sosial dan pendapat rumah tangga dilakukan melalui t-test.

• Kemiskinan

Sejumlah besar literatur menunjukkan bahwa kemiskinan disebabkan oleh faktor-faktor termasuk:

- (1) Keterbatasan pasokan pangan dan keterbatasan pemenuhan gizi yang disyaratkan;
- (2) Keterbatasan akses terhadap jasa kesehatan dasar yang bermutu dan rendahnya status kesehatan;
- (3) Rendahnya akses terhadap pendidikan bermutu yang murah (baik formal dan informal);
- (4) Terbatasnya kesempatan kerja dan pilihan untuk mengembangkan bisnis, keterbatasan perlindungan asset usaha, dan keterbatasan per-

lindungan kerja terhadap buruh anak dan perempuan, seperti pembantu rumah tangga dan tenaga kerja wanita.

Kelompok yang diperkirakan sebagai miskin atau mengalami proses kemiskinan adalah sebagai berikut:

1. Masyarakat pedesaan

Asumsi paling sederhana yang cukup valid mengenai penduduk miskin adalah bahwa secara umum mereka tinggal di wilayah pedesaan dengan nafkah utama di sektor pertanian dan sektor ekonomi tradisional lainnya.

Bagi negara berkembang, aspek penting yang harus diperhatikan bagi masalah kemiskinan adalah kebanyakan pemerintah mereka lebih memberikan perhatian kepada wilayah perkotaan dengan sektor modern dan komersialnya.

2. Etnis minoritas dan penduduk asli

Kondisi miskin yang dialami oleh etnis minoritas dan penduduk asli di negara berkembang dapat disebabkan oleh diskriminasi sosial-ekonomi dan sosial politik. Ketegangan antara kelompok-kelompok etnis dapat terjadi karena kesenjangan dalam pemilikan sumberdaya berharga, misalnya kesempatan kerja (kelompok etnis dominan biasanya mendominasi kesempatan kerja). Akibatnya, penduduk asli dan kelompok etnis minoritas hidup dalam kemiskinan absolut.

Secara umum, penduduk asli hidup di wilayah pedalaman atau hutan dengan akses yang terbatas ke wilayah yang maju. Komunitas-komunitas ini memiliki norma-norma mereka sendiri untuk memelihara lingkungan menurut kearifan lokal mereka. Di Bali, penduduk asli telah menyingkir ke wilayah hutan sejak dahulu untuk berlindung dari serangan oleh kelompok lainnya. Kebijakan pembangunan terpusat dan manajemen hutan telah mengabaikan nilai dari kearifan lokal.

• Kehidupan agama dan sosial-budaya sekitar masyarakat hutan di Bali

Hingga tahun 2003, wilayah hutan di Bali adalah seluas 130.686 hektar atau 23% dari pulau Bali. Sekitar 73% dari wilayah itu adalah hutan lindung; 27.629 hektar merupakan hutan produksi, terbagi antara hutan produksi permanen (1.907 ha), hutan produksi terbatas (6.719 ha), dan

hutan produksi konversi (19.002 ha). Produk utama hutan adalah kayu log. Pada 2003, produksi kayu log meningkat tajam ke 951 m³ dari 54 m³ di 1999. Ini adalah berita buruk, karena untuk menumbuhkan kayu diperlukan waktu yang lama. Peningkatan pengambilan kayu menunjukkan tidak sensitifnya kebijakan pemerintah terhadap masalah lingkungan hidup. Penyelewengan manajemen hutan akan menyebabkan derita bagi komunitas hutan karena mereka menghadapi risiko kerusakan ekologis seperti tanah longsor dan banjir.

Sejauh ini sekitar 25% atau 31.818 hektar hutan di pedalaman Bali telah dikonversi. Konversi hutan disebabkan oleh penggunaan hutan secara illegal oleh kelompok komunitas di sekitar hutan, penggunaan illegal bagi pembangunan sektor kehutanan lainnya, dan illegal logging. Menurut Kantor Kehutanan Bali, pada 2005, wilayah hutan pedalaman adalah 127.721 hektar atau hanya 22,5% dari total wilayah Bali (563.286 hektar). Ini mengindikasikan bahwa hutan Bali didominasi oleh hutan bakau.

Hutan Bali diklasifikasikan ke dalam tiga kategori: yaitu hutan lindung, hutan konservasi dan hutan produksi. Wilayah hutan lindung adalah 73,3% atau 95.766 hektar, berfungsi sebagai preservasi untuk air dan tanah, mendukung habitat fauna dan flora, dan mendukung pariwisata (*eco-tourism*), kebudayaan, kesehatan, pendidikan dan kegiatan penelitian. Hutan konservasi adalah hutan untuk melindungi, mengkonservasi, dan menjadi habitat bagi berbagai jenis flora dan fauna. Hutan-hutan ini berlokasi di Taman Nasional Bali Barat (TNBB), pusat wilayah konservasi alam Batukaru Tabanan, sekitar gunung Batur Bangli, taman wisata alam Bedugul dan Sangeh, dan taman nasional Ngurah Rai Denpasar. Hutan produksi dikonsentrasikan di Kabupaten Buleleng (4.732 hektar), Kabupaten Jembrana (2.933 hektar), dan beberapa wilayah kecil di kabupaten lainnya. Berbagai spesies pohon ditanam di dalam hutan produksi termasuk jati (*teak*), pinus (*pines*), sonokeling, dan pohon-pohon ekonomis lainnya.

Kondisi vegetasi hutan di Bali diklasifikasikan dalam tiga jenis. Kerusakan hutan mempunyai dampak bermakna terhadap peningkatan bencana kekeringan dan tanah longsor. Diperkirakan bahwa 3.100 hektar (10%) dari hutan lindung yang ada telah dirusak sebagai akibat dari penggunaan secara illegal oleh masyarakat. Saat ini, diperkirakan 2 juta hektar hutan telah dirusak di Indonesia. Kebanyakan wilayah ini berada di

luar Bali. Rendahnya kerusakan hutan secara relatif di Bali disebabkan oleh kaitan yang erat dengan sistem sosial-budaya-keagamaan masyarakat setempat.

Organisasi tradisional masyarakat dan norma-norma tradisional yang dikenal luas sebagai *awig-awig* dipatuhi oleh masyarakat Bali, khususnya di wilayah pedesaan. *Awig-awig* terfokus pada kebersamaan, keseragaman dan keserasian dalam aspek-aspek ekonomi, ekologi dan sosial. Pada akhirnya *awig-awig* mengikat masyarakat Bali dalam dua cara, bagaikan dua sisi mata uang; pada satu sisi menghimpun pertumbuhan kelompok, dan pada sisi lainnya meredam konflik yang diakibatkan oleh ketimpangan sosial-ekonomi. Organisasi dan norma-norma tradisional yang masih dipelihara akan dijelaskan sebagai berikut di bawah ini:

- **Banjar dan Banjar Adat**

Di Bali, terdapat organisasi komunitas lokal yang relevan bagi pengurangan kerusakan hutan, antara lain *banjar*, *banjar pakraman*, dan *subak abian*. *Banjar* adalah satu kesatuan sosial berbasis kesatuan wilayah. Kesatuan wilayah ini diperkuat oleh kesatuan tradisi dan upacara keagamaan suci. Di wilayah pegunungan, keanggotaan *banjar* dibatasi pada orang yang lahir di dalam wilayah banjar. Pembatasan ini memperkuat ikatan di antara anggota *banjar* khususnya untuk hal spesifik dan akan membentuk ikatan modal sosial.

Pada waktu tertentu, keputusan dibuat bersama di *Bale Banjar*, yang merupakan tempat pertemuan penduduk *banjar* secara rutin dan digunakan untuk kegiatan para warga. *Banjar* dikepalai oleh *kelian banjar* yang dipilih oleh warga *banjar* untuk periode tertentu. *Kelian banjar* bertanggung jawab untuk mengelola administrasi pemerintahan, sedangkan *kelian adat (kelian banjar pakraman)* bertanggung jawab untuk mengelola urusan-urusan umum yang terkait dengan kehidupan sosial dan keagamaan dari warga *banjar pakraman* sebagai satu komunitas. Pada sisi lain dia juga cakap dalam menyelesaikan masalah adat. Keanggotaan *banjar* adalah berdasarkan wilayah administratif sedangkan keanggotaan *banjar pakraman* adalah berdasarkan lingkup *Pura Kahyangan Tiga*, yang merupakan tempat sembahyang bagi warga *banjar adat*.

- **Subak and Subak Abian**

Subak abian biasanya lebih berkembang dalam masyarakat hutan ketimbang organisasi *subak*. *Subak* sepertinya terpisah dari *banjar* dan memiliki kepemimpinan sendiri. Keanggotaan *subak abian* tidak harus dari anggota *banjar* karena keanggotaan *subak* didasarkan pada lokasi lahan pertanian. Terkhusus bagi *subak*, keanggotaan didasarkan pada lokasi sawah dalam jalur irigasi yang sama. Oleh karena itu, tidak semua anggota *subak* hidup di dalam satu *banjar*.

Dalam *awig-awig subak*, tidak ada perlakuan khusus bagi pemilik lahan besar. Setiap pemilik tanah menikmati perlakuan yang sama dalam persyarikat sektor pertanian. Pelanggaran *awig-awig subak* akan berdampak pada penjatuhan sanksi moral seperti pengasingan (*exclusion*) oleh warga *subak*. Sanksi bisa dihindari dengan pertimbangan bahwa tanah dimiliki sebagai asset tetap dan tidak bisa dipindahkan oleh pemiliknya, meskipun sang pemilik bisa dipindahkan.

- **Sekaha**

Di luar organisasi komunitas, Bali juga memiliki organisasi khusus yang berfokus pada kehidupan spesifik yaitu *sekaha*. Organisasi ini mempunyai ciri turun-temurun, meskipun beberapa di antaranya temporer. Terdapat *sekaha* dengan fungsi membuat upacara terkait dengan komunitas desa, contohnya tari *sekaha baris* (kelompok tari baris), *sekaha terunateruni*. *Sekaha* pada umumnya permanen, meskipun beberapa bisa temporer karena dibentuk untuk keperluan khusus, contohnya *sekaha memula* (kelompok penanam), *sekaha manyi* (kelompok pemanen), *sekaha gong* (kelompok gamelan), dan sebagainya. *Sekaha* yang di atas umumnya adalah kelompok yang terpisah dari organisasi *banjar* atau desa.

- **Gotong-Royong**

Dalam kehidupan masyarakat Bali, terdapat bantuan yang dilakukan melalui sistem lainnya (*nguopin*) yang terkait dengan pengairan lahan dan kegiatan pertanian (penanaman, penggalian, panen, penanggulangan hama), kegiatan rumah tangga (perbaikan atap rumah, dinding, penggalian sumur, dll), upacara keluarga, atau kecelakaan dan kematian. *Nguopin* di antara perorangan biasanya didasarkan pada pemahaman bahwa bantuan yang diberikan harus dikembalikan dengan cara yang sama. Di samping *nguopin*, anggota masyarakat saling membantu melalui kegiatan di dalam

sekaha. Kerjasama lain yang mirip bernama *ngedeng*, contohnya satu kelompok gamelan mengambil bagian dalam tarian pada upacara *odalan*. Orang juga saling membantu dalam *kerja bhakti (ngayah)* bagi kegiatan keagamaan, publik, dan pemerintah. Masyarakat Bali mengakui keberadaan *desa, kala, patra*. Kesadaran ini menciptakan berbagai perbedaan variasi dan tempat. Agama Hindu yang telah lama terintegrasi ke dalam masyarakat Bali adalah satu unsur yang memperkuat kesadaran akan kesatuan tersebut. Pengaruh dari perbedaan budaya Hindu-Jawa pada berbagai daerah di Bali sejak masa Majapahit, menciptakan dua bentuk masyarakat Bali, yaitu masyarakat *Bali-Aga* dan *Bali-Majapahit*. Secara umum, masyarakat *Bali-Aga* mendiami wilayah pegunungan sedangkan masyarakat Bali dari Majapahit umumnya berkembang di wilayah dataran dan merupakan bagian terbesar dari penduduk Bali. Sebagian besar pegunungan berbentuk hutan yang luas, terbentang dari barat ke timur, membagi Bali ke dalam dua bagian: dataran yang relatif sempit di utara dan yang lebih luas di selatan. Sampai saat ini, hutan luas di Bali masih dipelihara dan dilestarikan karena sebagian besar pura/candi Bali, sebagai tempat berdoa masyarakat Hindu, dibangun di wilayah hutan. Misalnya Pura Pulaki (Pulaki *Temple*), Pura Batukaru (Batukaru *Temple*), dan pura terbesar di Bali yaitu Pura Besakih (Besakih *Temple*), yang terletak megah di lereng Gunung Agung.

• Modal Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat Sekitar Hutan di Bali

Pelestarian lingkungan hutan di Bali berkaitan erat dengan norma-norma masyarakat. Norma-norma, bersama dengan jaringan dan *trust*, menciptakan modal sosial di Bali. Utari *et.al.* (2007) berpendapat bahwa modal sosial di wilayah tertinggal di Bali dipengaruhi secara signifikan oleh norma-norma, tidak oleh *trust*. Alasannya adalah bahwa penurunan *trust* tidak akan melemahkan modal sosial di wilayah tertinggal.

Model yang dikembangkan untuk menganalisis hubungan antara modal sosial dan pendapatan rumah tangga didasarkan pada model Grootaert (1999) dan diadaptaasi untuk kondisi sosial-budaya Bali. Modal sosial diperhitungkan dengan hal-hal yang terkait pada norma kelompok yang menentukan tingkat pengeluaran sosial pada setiap rumah tangga (*sexp*). Tingkat kesejahteraan rumah tangga akan diperkirakan menurut jumlah pendapatan keluarga.

Tabel 1
Analisis hasil dari relasi antara berbagai variabel Modal Sosial dan pendapatan Rumah tangga

Variabel	Regression coefisien with TSLS	
	Income (<i>inc</i>)	Social capital (<i>sexp</i>)
Constant	-223092.9 (33847)	136352.7 (186217)
Jumlah anggota keluarga yang bekerja (<i>emp</i>)	117195.2** (64066)	
Densitas Jaringan (<i>nw</i>)	13092.18 (37242)	-3381.959 (55275)
Partisipasi dalam pengambilan keputusan kelompok (<i>part</i>)	419808.9*** (76696)	
Modal Sosial (<i>sexp</i>)	2.388** (1.277)	
Dummy region (<i>wil</i>)		70173.84*** (22439)
Pendapatan (<i>inc</i>)		0.040402*** (0.017)

sumber: analisis data primer, 2005.

angka dalam () menunjukkan standar deviasi.

***signifikan di 5 persen ** signifikan di 10 persen * signifikan di 20 persen.

Analisis menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan rumah tangga (*inc*) adalah dipengaruhi secara bermakna oleh keterkaitan kepada norma (*sexp*), jumlah anggota keluarga yang bekerja (*emp*), partisipasi dalam organisasi terpenting (*part*) dan kepadatan jaringan (*nw*). Namun, dari empat variabel, hanya tiga variabel yang menunjukkan efek bermakna yaitu jumlah anggota keluarga yang bekerja (*emp*), partisipasi dalam organisasi terpenting (*part*), dan keterkaitan kepada norma (*sexp*). Semakin banyak anggota keluarga yang bekerja, akan semakin besar kesejahteraan rumah tangga. Variabel keterkaitan kepada norma (*sexp*) mempunyai efek positif terhadap tingkat kesejahteraan rumah tangga. Kenaikan seribu rupiah bagi pengeluaran modal sosial akan meningkatkan pendapatan rumah tangga Rp 2,388, ceteris paribus. Hasil ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan secara parsial, khususnya Grootaert (2001) dan Brata (2004) yang menyatakan bahwa partisipasi meningkatkan akses

komunitas terhadap sumber keuangan sehingga meningkatkan kesejahteraan.

Kesimpulan

Kemiskinan, termasuk yang dialami masyarakat sekitar hutan, masih menjadi masalah yang perlu ditangani secara khusus. Pengabaian dalam mengelola kemiskinan tidak saja menyebabkan kesenjangan tetapi juga cenderung mendorong masyarakat melakukan pengambilan kayu secara illegal dan penggunaan hutan secara illegal. Keterkaitan terhadap norma-norma dan keluasan jaringan dalam kenyataan memberikan pengaruh positif terhadap tingkat pendapatan rumah tangga masyarakat di sekitar hutan di Bali.

Referensi

- Artadi IK 1993. *Manusia Bali*. Bali Post Press. Denpasar.
- Casson M & A Godley 2000. *Cultural Factors in Economic Growth*. Germany. Springer-Verlag Berlin – Heidelberg.
- Coleman JS 1990. *Foundations of Social Theory*. Cambridge MA: Belknap.
- Collier P 1998. *Social capital and poverty*. World Bank *SCI Working Paper* no 4, November. (www.iris.umd.edu/adass/proj/soccap.asp).
- Cristoforou A 2003. *Social Capital and Economic Growth: The Case of Greece*. London School of Economic: Paper for The First PhD Symposium on Social Science Research in Greece of the Hellenic Observatory. European Institute. asimina@aueb.gr.
- Dasgupta P & I Serageldin 2002. *Social Capital: A Multi Faceted Perspective*. World Bank, Washington, DC.
- Dasgupta P 2005. *A Measured Approach: Special Issue*. September 2005. ISSN 0036-8733. Scientific American, Inc, 415 Madison Avenue, New York.
- Fukuyama F 1995. *Trust: The Social Virtues and the Creation of Prosperity*. The Free Press, New York.
- Fukuyama F 1999. *Social Capital and Civil Society*. The Institute of Public Policy. George Mason University. International Monetary Fund.
- Glaeser EL, Laibson D & B Sacerdote 2001. *The Economic Approach of Social Capital*. Harvard University, Cambridge, Massachusetts.
- Granovetter MS 1973. The Strength of Weak Ties. *American Journal of Sociology*, 78, 1360 – 80.
- Grootaert C 1999. *Social Capital, Household Welfare and Poverty in Indonesia*. World Bank Working Paper, unpublished.

- Grootaert C 2001. *Does Social Capital Help the Poor? A Synthesis of Findings from the Local Level Institutions Studies in Bolivia, Burkina Faso and Indonesia*. Local Level Institutions Working Paper No. 10, Social Development Department, World Bank, Washington, D.C.
- Grootaert C & T van Bastelaer 2001. *Understanding and Measuring Social Capital. A Multidisciplinary tool for practitioners*. The World Bank Washington, D.C.
- Iyer S, M Kitson & B Toh 2005. Social Capital, Economic Growth and Regional Development. *Regional Studies*, Vol 39.8, pp.1011040, November 2005.
- Olson M 1982. *The Rise and Decline of Nation*. New Haven. Yale University Press.
- Putnam RD 1993. *Making Democracy Work: Civic Tradition in Modern Italy*. Princeton: Princeton University Press.
- Putnam RD 2000. *Bowling alone: The Collapse and Revival of American Community*. Simon and Schuster, New York, NY.